

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN  
WILAYAH PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA**

*Skripsi*

Oleh :

**DESSHINTA YONINGTYAS**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRACT**

### **THE FACTORS WHICH AFFECT INEQUALITY OF REGIONAL IN SUMATERA**

**By**

**DESSHINTA YONINGTYAS**

The research objective was to analyze the effect of economic growth, unemployment, investment and infrastructure on inequality in the Sumatra region. The data used is panel data consisting of time series data for 2009-2019 and a cross section of 10 provinces in Sumatra. The variables used are regional inequality, economic growth, unemployment, investment, and infrastructure. The analysis tool used is panel data regression, namely the Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the practice of economic growth and infrastructure had a negative and significant effect on regional inequality. Unemployment has a positive and significant effect on regional inequality, while investment has no significant effect on regional inequality in the 10 provinces in Sumatra in the 2009-2019 study period.

*Keywords: Fixed Effect Model (FEM), Economic Growth, Unemployment, Infrastructure, and Investment.*

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN WILAYAH PROVINSI-PROVINSI DI SUMATERA**

**Oleh**

**DESSHINTA YONINGTYAS**

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan infrastruktur terhadap ketimpangan di wilayah Sumatera. Data yang digunakan merupakan data panel terdiri dari data *time series* tahun 2009-2019 dan *cross section* 10 provinsi di Sumatera. Variabel yang digunakan adalah ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan infrastruktur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pertumbuhan ekonomi, dan Infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah 10 provinsi di Sumatera pada periode penelitian 2009-2019.

*Kata Kunci: Fixed Effect Model (FEM), Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, Infrastruktur, dan Investasi.*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN  
WILAYAH PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA**

**Oleh**

**DESSHINTA YONINGTYAS**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**Judul Skripsi** : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN WILAYAH PROVINSI-  
PROVINSI DI PULAU SUMATERA**

**Nama Mahasiswa** : **Desshinta Yoningtyas**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **1411021028**

**Jurusan** : **Ekonomi Pembangunan**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**



**1. Komisi Pembimbing**

**Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**  
**NIP 19600621 198603 1 002**

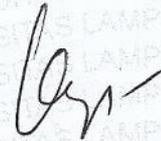
**2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

**Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.**  
**NIP 19631215 198903 2 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

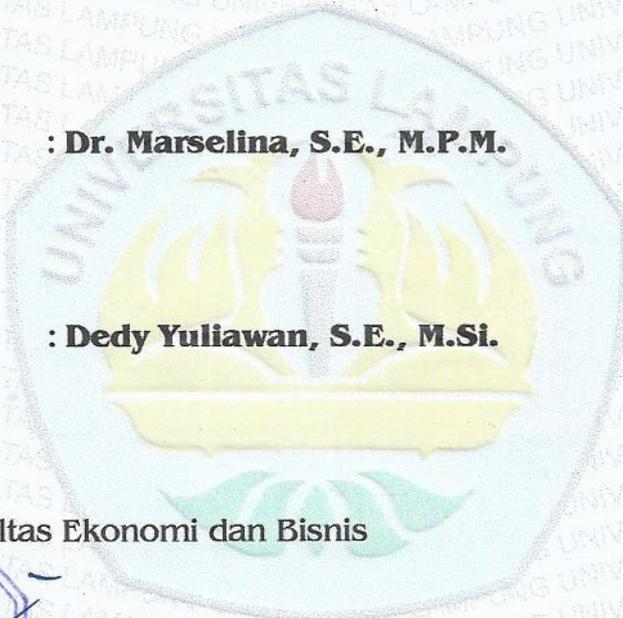
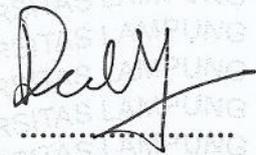
**Ketua : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**



**Penguji I : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



**Penguji II : Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Maret 2021

Penulis



Desshinta Yoningtyas

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kabupaten Bantul, Kota D.I. Yogyakarta tanggal 17 Desember 1995 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Aniyah.

Penulis merupakan alumni dari Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame lulus pada tahun 2008. Lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri(SMPN) 29 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Kemudian itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis masuk sebagai Mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KOIN pada tahun pertama.

Pada tahun 2018 penulis menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus di periode pertama pada bulan Januari.

## MOTTO

(6) يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ (5) يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

(QS. Asy Syarh : 5-6)

*"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri"*

(QS. Al-Isra' : 7)

*"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu"*

(Ali bin Abi Tholib)

*"Pemberi maaf yang indah adalah memaafkan tanpa memarahi dan kesabaran yang paling indah adalah bersabar tanpa mengeluh"*

(Ibnu Taimiyah)

*"Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Buang yang keruh ambil yang jernih. Carilah baik dalam buruk orang, itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri itulah ikhlas"*

(Desshinta Yoningtyas)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat islam. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah memberi dukungan baik mental, spiritual, maupun material. Terimakasih yang teramat dalam atas kasih sayang dan perjuangannya. Sosok yang selalu menjadi garda terdepan untuk memberi semangat saat anakmu merasa tidak yakin dengan pilihannya sendiri. Bahkan sepuluh jariku tidak cukup untuk menghitung hal-hal yang kuingat dari pengorbanannya yang tak terbalaskan. Semoga karya ini menjadi langkah awal menuju kesuksesanku dan membuat kalian bahagia.
- Danang Ari Prasetyo, adikku tersayang yang bahkan kadang jauh lebih dewasa dibanding diriku sendiri. Semoga tahun ini apa yang menjadi cita-cita mu dapat terwujud dan percayalah sebuah usaha tidak akan pernah menghiyanati hasil.
- Teruntuk Tri Minarto, saat aku tidak percaya diri kamu tak pernah menjauh, merangkulku dengan motivasi, membimbingku dengan hangat sembari mendampingiku sampai aku selesai dengan diriku sendiri di jalan yang lebih baik.
- Dwi Wahyuningsih, Devi Sardirika dan Tsara Subianto Putri, Hollyati Subhi Gurnita sahabat terkasih yang telah banyak membantu dan selalu ada di saat sulit sekalipun.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Provinsi Di Pulau Sumatera. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Karomani, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Neli Aida, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E.,M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
5. Bapak Moneyzar Usman S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., dan Bapak Dedi Yuliawan S.E., M.Si., selaku dosen pembahas yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan yang sangat berharga kepada penulis.
7. Seluruh dosen program studi Ekonoii Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Ayah Sunaryo dan Ibu Aniyah tersayang yang selalu mendoakan dan memberi semangat disaat-saat sulit sekalipun.

9. Danang Ari Prasetyo dan Deni Ardiansyah yang selalu menjadi penghibur saat rasa mulai menyerah untuk menyelesaikan skripsi dan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan
10. Tri Minarto yang selalu mengingatkan, memberikan semangat serta motivasi dan dukungan sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Dwi Wahyuningsih, Tsara Subianto Putri, Devi Sardirika dan Teman-teman seperjuangan di Universitas Lampung.

Demikianlah skripsi ini dibuat semoga bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 17 Maret 2021

**DESSHINTA YONINGTYAS**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan pengajuan skripsi ini yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN WILAYAH PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di pulau Sumatera. Selama mengerjakan tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan saran dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Akhirnya karena keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan proposal ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 17 Maret 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	14
1. Peran Pemerintah.....	14
2. Pembangunan Ekonomi.....	16
3. Pembangunan Ekonomi Daerah .....	17
4. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	18
5. Model Pertumbuhan Neo-Klasik.....	19
6. Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik .....	20
7. Pelayanan Publik .....	21
8. Hipotesis Kuznet .....	21
9. Ketimpangan.....	24
10. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah .....	25
11. Indeks Williamson.....	26
12. Investasi .....	27
13. Pengangguran .....	29
14. Infrastruktur .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	35
D. Hipotesis Penelitian.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
C. Jenis Dan Sumber Data .....	36
1. Jenis Data.....	36
2. Sumber Data .....	38
D. Definisi Operasional .....	38
1. Variabel Dependen.....	38

2. Variabel Independen .....	39
E. Metode Analisis Pengolahan Data.....	41
1. Analisis Deskriptif .....	41
2. Uji Hipotesis .....	44
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Statistik Deskriptif .....	48
B. Hasil Penelitian .....	50
1. Uji Signifikansi Model.....	50
2. Pengujian Asumsi Klasik .....	52
3. Hasil Regresi .....	53
4. Pengujian Hipotesis Statistik.....	54
C. Pembahasan.....	57
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah .....	57
2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Wilayah.....	59
3. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah .....	60
4. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Wilayah .....	61
D. Implikasi Kebijakan .....	63
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
1. Simpulan.....	65
2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%) .....	5
1.2 Investasi Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%) .....	6
1.3 Data Pengangguran pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%) .....	9
1.4 Infrastruktur Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%) .....	11
4.1 Statistik Deskriptif .....	48
4.2 Hasil Uji Chow .....	50
4.3 Hasil Uji Hausman .....	51
4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	52
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	52
4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	53
4.7 Hasil <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	53
4.8 Hasil Uji-t .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kurva Kuznet .....	22

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap wilayah umumnya mempunyai masalah di dalam proses pembangunannya. Masalah yang paling sering muncul di dalam wilayah tersebut adalah masalah ketimpangan wilayah dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan wilayah antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Hartono, 2008). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Adanya perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah (Kuncoro, 2003).

Pemerataan pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi akan tetapi faktor lainnya yang meliputi perbedaan sumber-daya alam, sumberdaya manusia, potensi wilayah, karakteristik wilayah, perbedaan kondisi sosial demografi, aksesibilitas barang dan jasa yang kurang memadai, dan alokasi dana pembangunan wilayah. Adisasmita, (2013).

Ketimpangan wilayah juga merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012).

Adanya ketimpangan dalam suatu daerah akan mendorong daerah yang tertinggal untuk mengembangkan perekonomiannya di daerahnya agar tidak terdapat jurang yang besar dengan daerah maju. Tingkat ketimpangan antar wilayah dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau lainnya (Antonescu, 2010).

Menurut Sjafrizal (2012) menjelaskan bahwa ketimpangan merupakan masalah umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah dan investasi. Ketimpangan dapat memberikan dampak positif, yaitu daerah akan saling bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi ketimpangan dapat pula berdampak negatif seperti ekonomi yang tidak

efisien, stabilitas sosial dan solidaritas yang lemah, serta ketimpangan yang tinggi (Todaro dan Smith, 2004). Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan Gini Rasio dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah. Namun pada skala regional dapat diukur dengan Indeks Williamson yang merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita.

Peran pemerintah diperlukan dalam penyelesaian pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pemerataan wilayah akan meningkat pula. Di era otonomi daerah sekarang ini, dimana setiap daerah dituntut untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan antara wilayah yang maju dan wilayah yang belum maju dapat menurun.

Indonesia mempunyai 33 provinsi dan 6 pulau yang salah satunya adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sendiri memiliki 10 provinsi didalamnya ada potensi alam dengan penggunaan teknologi yang berbeda-beda. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan penyebarannya berbeda pada setiap daerah. Perbedaan seperti ini dapat menjadi penghambat dalam pemerataan pembangunan karena terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di beberapa provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan ekonomi dan dapat memberikan efek menyebar (*spread effect*). Namun pada kenyataannya kekayaan

alam ini tidak dimiliki setiap provinsi secara merata. Hal inilah yang dapat menyebabkan ketimpangan pada setiap provinsi.

Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara eksplisit dapat dimaknai adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tersebut. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yeniwati (2013), ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak tahun 2000an di Sumatera dan desentralisasi diduga akan mendorong ketimpangan antar daerah yang lebih lebar.

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu provinsi, dimana jika semakin besar PDRB per kapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah

perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumberdaya potensial yang telah berpindah tersebut.

Tabel 1.1 PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	$\bar{X}$
ACEH	34.85	3.22	3.28	3.85	2.61	1,55	-0,73	3.29	4.18	4.61	4.15	7.11
SUMATERA UTARA	6.78	6.71	6.66	6.45	6.07	5.23	5.10	5.18	5.12	5.18	5.22	5.79
SUMATERA BARAT	6.64	6.56	6.34	6.31	6.08	5.88	5.53	5.27	5.30	5.16	5.05	5.83
RIAU	4.65	4.98	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.18	2.66	2.37	2.84	3.13
JAMBI	7.67	7.77	7.86	7.03	6.84	7.36	4.21	4.37	4.60	4.74	4.40	6.08
SUMATERA SELATAN	6.92	6.06	6.36	6.83	5.31	4.79	4.42	5.04	5.51	6.04	5.71	5.73
BENGKULU	6.72	6.88	6.85	6.83	6.07	5.48	5.13	5.28	4.98	4.99	4.96	5.83
LAMPUNG	6.02	6.35	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.14	5.16	5.25	5.27	5.65
KEP. BANGKA BELITUNG	6.32	6.59	6.90	5.50	5.20	4.67	4.08	4.10	4.47	4.46	3.32	5.06
KEP. RIAU	6.22	6.79	6.96	7.63	7.21	6.60	6.02	4.98	1.98	4.58	4.89	5.81
$\bar{X}$	9.28	6.19	6.33	6.06	5.36	5.31	4.43	4.48	4.40	4.74	4.58	5.60

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 1 memperlihatkan PDRB di pulau Sumatera pada tahun 2009 - 2019. Secara total PDRB perkapita di Sumatera mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun apabila dilihat per propinsinya hanya ada dua propinsi dari sepuluh propinsi yang ada di Sumatera yang rata-rata PDRB perkapitanya sangat jauh jaraknya dari propinsi lainnya yaitu Propinsi Riau sebesar 3,13 persen.

Rendahnya rata-rata PDRB di propinsi Riau dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan dengan laju pertumbuhan

negatif. Kegiatan ekonomi utama masih bersifat ekstraktif, memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.

Secara harfiah, pembangunan bertujuan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, namun dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan penyimpangan sehingga hasil pembangunan tersebut belum dinikmati oleh penduduk di wilayah Sumatera secara merata. Ketimpangan di wilayah Sumatera selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Adanya ketimpangan wilayah antar propinsi di Sumatera disebabkan berbagai kendala, baik dari segi investasi, maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki masing masing propinsi yang tidak sama.

Tabel 1.2 Investasi Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	$\bar{X}$
Aceh	4.378	3.711	5.558	4.098	8.199	8.539	8.341	7.806	6.663	6.877	8.191	6.578
Sumatera												
Utara	7.631	6.496	7.422	7.844	8.531	8.349	8.363	8.490	9.366	9.033	9.891	8.310
Sumatera												
Barat	6.129	4.301	6.934	6.786	6.519	6.043	7.348	8.242	7.324	7.745	8.015	6.853
Riau	8.127	6.944	8.918	8.603	8.492	8.950	9.205	8.797	9.290	9.111	10.177	8.783
Jambi	5.366	5.409	7.666	7.276	7.937	6.811	8.172	8.265	8.009	7.964	8.398	7.388
Sumatera												
Selatan	6.364	7.461	6.974	7.983	8.130	8.860	9.301	9.052	9.012	9.161	9.736	8.367
Bengkulu	1.887	2.140	2.427	3.963	4.697	2.054	6.317	6.856	5.692	8.498	8.605	4.830
Lampung	6.310	5.607	6.715	5.718	7.189	8.159	7.005	8.705	8.856	9.419	7.795	7.407
Kep. Bangka		-										
Belitung	5.519	0.916	6.243	6.279	6.411	6.422	6.931	7.697	7.459	8.043	7.978	6.188
Kep. Riau	5.481	5.117	7.223	3.773	6.035	3.350	6.417	6.199	7.243	8.386	8.641	6.169

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Pada table 2 diatas, rata-rata investasi tertinggi terdapat di provinsi riau sebesar 8,78 persen dan yang terendah di provinsi Bengkulu sebesar 4,83 persen. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap

angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 2004: 127).

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan.

Pada saat berbicara mengenai Teori ketimpangan daerah sama dengan berbicara tentang teori pertumbuhan ekonomi karena keduanya mempunyai keterkaitan. Melanjutkan pembahasan diatas tentang dua buah teori ketimpangan yaitu Harrod Domar dan NeoKlasik memberikan perhatian khusus dimana peranan kapital sangatlah penting. Investasi modal yang ditanamkan di suatu daerah akan menarik modal tersebut masuk ke dalam daerahnya, dengan begitu pembangunan di daerah tersebut meningkat sejalan dengan meningkatnya penghasilan daerah tersebut.

Hal tersebut pula yang membuat daerah satu dengan yang lainnya menjadi timpang. Daerah daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sedangkan untuk daerah yang relatif tertinggal akan tumbuh dengan lambat. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah, sehingga perlu dirancang mekanisme khusus dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah (Mauliddiyah, 2014).

Harrod-Domar (dalam Arsyad, 1999) menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan.

Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah. Teori Harrod-Domar juga menyatakan bahwa investasi mampu meningkatkan kapasitas barang modal (Sukirno, 1996). Peningkatan kapasitas barang modal akan meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sebab dengan adanya investasi akan mendorong produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Investasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Keadaan demikian dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi akan cenderung menambah ketidak merataan. Pada wilayah yang sedang

berkembang, permintaan barang dan jasa maka akan mendorong naiknya investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut, kemudian keadaan sebaliknya yaitu pada wilayah yang kurang berkembang, investasi akan cenderung rendah karena pendapatan masyarakatnya juga rendah. Kekuatan pasar mempunyai peran terpenting dalam menarik investasi swasta kesuatu daerah dengan keuntungan yang dimiliki oleh daerah tersebut ( Sjafrizal, 2008).

Tabel 1.3 Data Pengangguran pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	$\bar{X}$
Aceh	9.01	8.485	8.81	8.5	9.23	7.885	8.83	7.85	6.98	6.455	5.865	7.991
Sumatera Utara	8.35	7.72	7.825	6.355	6.27	6.09	6.55	6.165	6.005	5.575	5.485	6.581
Sumatera Barat	7.935	7.26	7.765	6.57	6.705	6.41	6.44	5.45	5.69	5.55	5.31	6.462
Riau	8.76	7.965	6.8	4.83	4.835	5.775	7.275	6.685	5.99	5.96	5.77	6.422
Jambi	5.37	4.92	4.305	3.445	3.825	3.79	3.535	4.33	3.77	3.755	3.905	4.086
Sumatera Selatan	7.995	6.6	6.445	5.63	5.125	4.4	5.55	4.125	4.095	4.125	4.235	5.302
Bengkulu	5.195	4.325	3.46	2.9	3.355	2.545	4.06	3.57	3.275	3.105	2.945	3.521
Lampung	6.4	5.76	5.95	5.205	5.38	4.935	4.29	4.58	4.38	4.195	3.995	5.006
Kep. Bangka Belitung	5.48	4.935	3.585	3.125	3.435	3.905	4.82	4.385	4.12	3.63	3.505	4.084
Kep. Riau	7.96	7.055	6.29	5.395	5.84	5.975	7.625	8.36	6.8	6.775	66.6	12.243

Faktor demografis merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tingkat produktivitas kerja masyarakat di suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi tingkat produktivitas suatu daerah, sehingga akan menyebabkan suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah lain. Pada table 3 diatas tingkat pengangguran tertinggi terdapat di provinsi kep. Riau dengan rata rata mencapai 12.243% dan yang paling rendah terdapat di provinsi Bengkulu sebesar 3.521%. Jika dilihat melalui kondisi

demografis dari sisi pengangguran di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula (Syafrizal, 2017).

Pengangguran menurut Sukirno (1994) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum memiliki atau memperoleh pekerjaan. Pengangguran terjadi akibat kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memperoleh keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang mereka produksi, semakin banyak barang atau jasa yang diminta maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang secara langsung, bagi sebagian orang kehilangan pekerjaan merupakan penurunan standar kehidupan. Maka tak heran pelaku politik melakukan penawaran membuat kebijakan dalam membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga komponen utama, yaitu:

1) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya) 2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi 3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Tabel 1.4 Infrastruktur Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2019 (%)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	$\bar{X}$
Aceh	20678	20967	21387	21543	21978	22453	22634	22810	24019	24019	23915	22400.27
Sumatera Utara	35273	36454	36548	39283	36217	38726	39859	40773	39543	39543	39245	38314.91
Sumatera Barat	20973	21984	21736	22937	27163	25735	24363	23434	22556	22556	22388	23256.82
Riau	25353	27464	23947	24348	25348	26153	28737	27363	24992	25071	24497	25752.09
Jambi	12983	12938	13545	13746	12534	12846	13782	13731	13027	13027	13092	13204.64
Sumatera Selatan	17663	17236	18383	17384	18947	18374	18347	18821	19233	19233	18989	18419.09
Bengkulu	9353	9283	9392	9030	9183	9273	9243	9237	9196	9196	9327	9246.636
Lampung	21282	24732	23541	22019	21622	21032	21029	21162	21044	21044	20759	21751.45
Kep. Bangka Belitung	5027	5199	5433	5222	5948	5428	5343	5433	5485	5485	5536	5412.636
Kep. Riau	5733	5664	5746	5596	5542	5435	5423	5552	5686	5686	5686	5613.545

Infrastruktur yang berperan penting dalam proses pembangunan diantaranya adalah infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi dapat berupa jalan, listrik, dan air. Infrastruktur ekonomi dapat menjadi modal yang digunakan oleh tenaga kerja dalam melakukan proses produksi seperti listrik dan air bersih. Konsumsi air bersih oleh rumah tangga juga dapat menjadi sesuatu yang berperan menjaga kesehatan tenaga kerja, sehingga air bersih dapat pula berperan secara tidak langsung terhadap perekonomian melalui peningkatan kesehatan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat mampu bekerja dengan baik, sehingga mereka diharapkan menjadi lebih produktif.

Oleh sebab itu, kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data 4 di atas infrastruktur provinsi-provinsi di pulau sumatera masih rendah rata-ratanya maka dibutuhkan sebuah penelitian mengenai keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Analisis yang akan dilakukan menggunakan cakupan provinsi agar memperoleh hasil yang lebih spesifik dan mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkembangnya provinsi-provinsi sejak tahun 2000-an di Pulau Sumatera dan desentralisasi juga berdampak mendorong ketimpangan antar provinsi menjadi lebih luas. Oleh karena itu, dengan melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi tidak merata, maka penelitian ini diharapkan dapat meninjau seberapa besar ketimpangan pada berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap wilayah ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera?
4. Apakah infrastruktur berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan infrastruktur berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastuktur terhadap wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
5. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di pulau Sumatera.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, memperkaya referensi dan literatur mengenai ketimpangan baik ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan ekonomi serta hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan pada penelitian tahap selanjutnya.

##### 2. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan perekonomian selanjutnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Peran Pemerintah**

Dalam undang-undang otonomi daerah, dalam ketentuan umum yang dimaksud pemerintah ada dua pengertian. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau disebut pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Adapun penyelenggara pemerintah yaitu presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden serta menteri-menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya, dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian.

1) Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-

sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografisnya dan lain-lain. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

2) Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi, ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.

3) Suatu daerah adalah suatu ekonomi, ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan lain-lain. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengusahakan alokasi sumber-sumber ekonomi dapat dilaksanakan dengan secara efisien.

Pemerintah sendiri memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu peranan tersebut adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sebab tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sehingga pada intinya fungsi alokasi memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik.

## 2. Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Menurut Meier (1995) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi.

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Bruto atau GDP). Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Menurut Lincolin Arsyad (1997) menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai :1) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk. 2) Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diikuti oleh perubahan dan modernisasi struktur ekonominya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

### **3. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Lincoln Arsyad, 1997). Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.

Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

##### 1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

##### 2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

##### 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan maka harus mempertimbangkan PDRB riil satu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya, diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{to}}{PDRB_{to}} \times 100$$

Dimana:

$Y_{it}$  = Pertumbuhan ekonomi provinsi i, tahun t

$PDRB_{it}$  = PDRB ADHK provinsi i, tahun t

$PDRB_{t0}$  = PDRB ADHK provinsi i, tahun t-1

Ada beberapa alat pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu ( Asman Al Faiz, 2011):

a. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB ataupun PDRB adalah ukuran yang bersifat global dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai karena belum dapat mensejahterakan penduduk yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik regional per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

## 5. Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan ini juga menekankan

bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

Menurut teori neoklasik membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
- b) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
- c) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

## **6. Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik**

Dampak balik (backwash effect) yaitu sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebabsebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (spread effect) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayahwilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan,1993).

Menurut Myrdal dalam M.L Jhingan (1993), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak sebar (spread effect) semakin mengecil.Semakin kumulatif

kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

## **7. Pelayanan publik**

Teori ekonomi publik menyatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kekuasaan atas orang yang hidup sebagai masyarakat dan untuk menyediakan dan membiayai pelayanan dasar yang esensial. Alasan utama memerlukan pelayanan pemerintah adalah bahwa pemerintah dapat menyediakan barang dan jasa yang sulit diperoleh atau disediakan oleh individu atau privat di pasar serta pertimbangan bahwa barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah adalah bisa diakses oleh seluruh warga Negara (Hyman, 1983).

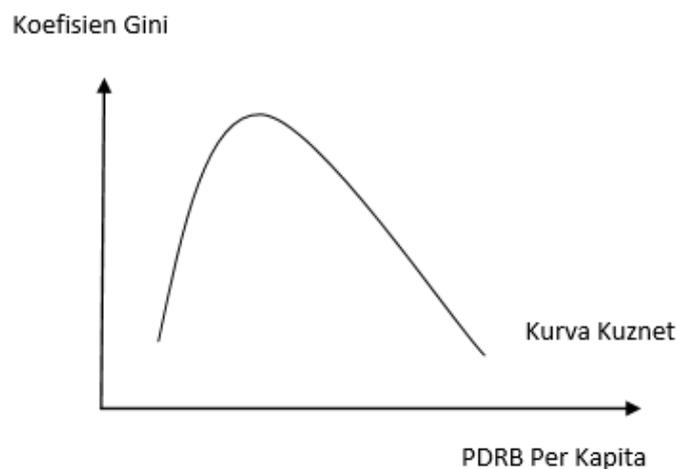
Berdasarkan kajian ekonomi publik bahwa tiga fungsi pemerintah, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi mempertanyakan ketika penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau program kebijakan meningkatkan perpaduan barang dan jasa yang dihasilkan secara ekonomis. Distribusi mempertanyakan siapa yang dirugikan dari kebijakan ekonomi. Stabilisasi mempertanyakan apa implikasi kebijakan penerimaan, pengeluaran dan bersama moneter terhadap kesempatan kerja agregat, hasil dan harga. Pembiayaan pemerintah dalam demokrasi tidaklah sederhana. Pemerintah secara legal harus menjamin atas tanggung jawab dan resposibilitas dari pilihan-pilihan publik dan untuk memastikan pembiayaan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Mikesell, 1995).

## 8. Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan merata. Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya

**Gambar 2.1**

**Kurva Kuznet**



Sumber : Todaro (2006)

Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya distribusinya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut seperti digambarkan dalam kurva Kuznet pada gambar 2.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek adakorelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan, namun

dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif. Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui hampir diseluruh negara maju, yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
- b. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

**a. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Wilayah**

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan. Dan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya baik secara langsung maupun tidak langsung akan tetap berpengaruh terhadap ketimpangan daerah. Ketimpangan ekonomi dalam hal ini pembagian pendapatan adalah ketimpangan perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Kesenjangan pembagian pendapatan di negara-negara berkembang sejak tahun puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan yang menguatamakan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitiannya di beberapa negara. Untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi diperlukan adanya peran pemerintah dalam hal mengatur ekonomi.

Para ekonom neo-Klasik mengemukakan pertumbuhan ekonomi cenderung akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, dan RRC. Kelompok Neo-Klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Tirmidzi, 2012).

Berbeda dengan pendapat Syafrizal, ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

## **9. Ketimpangan**

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Syafrizal, 2008).

Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2004).

#### **10. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah**

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,
- 2) Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,
- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,

- 4) Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,
- 5) Rendahnya mobilitas sosial,
- 6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,
- 7) Kondisi memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang,
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

### 11. Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}}{\bar{Y}}$$

Dimana :

$Y_i$  = PDRB per kapita daerah  $i$

$\bar{Y}$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah  $i$

$N$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

## **12. Investasi**

Investasi adalah perpindahan modal dimana akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Di wilayah yang maju, permintaan yang meningkat akan merangsang pertumbuhan investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Investasi hanya akan terjadi pada lingkup tertentu sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1993). Kelangkaan modal ini yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Menurut Sadono (1994), banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan masa depan untuk memperoleh keuntungan, maka beberapa faktor juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan investasi dalam perekonomian. Faktor-faktor utama dalam menentukan investasi yaitu: tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan keadaan ekonomi masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi yang dilakukan oleh swasta dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu kegiatan

menanam modal untuk melakukan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Menurut Krugman (2005), yang dimaksud dengan FDI atau PMA yaitu arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumberdaya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Investasi asing (PMA) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Menciptakan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan daya saing dunia usaha dalam negeri.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### a. Hubungan Antara Investasi Dengan Ketimpangan Wilayah

Investasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Keadaan demikian dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi akan cenderung menambah ketidakmerataan. Pada wilayah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa maka akan mendorong naiknya investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut, kemudian keadaan sebaliknya yaitu pada wilayah yang kurang berkembang, investasi akan cenderung rendah karena pendapatan masyarakatnya juga rendah. Kekuatan pasar mempunyai peran terpenting dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah dengan keuntungan yang dimiliki oleh daerah tersebut ( Sjafrizal, 2008).

### 13. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha

tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,2000).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

- 1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

#### **a. Hubungan antara Pengangguran terhadap Ketimpangan Wilayah**

Dibandingkan dengan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan yang telah diperdebatkan selama beberapa dekade, diskusi mengenai hubungan antara ketimpangan dan pengangguran jarang dilakukan. Kajian-kajian yang hanya sedikit itu hanya membahas dampak pengangguran terhadap ketimpangan. Sebaliknya sekarang di dunia nyata melihat adanya konsekuensi yang besar atas angka pengangguran yang tinggi dan tidak turun-turun, yaitu meningkatnya ketidakpuasan sosial yang tentunya dapat menimbulkan gejolak sosial yang, menurut World of Work Report (ILO, 2011), didorong oleh ketimpangan. Castells-Quintana dan Royuela (2012) berpendapat bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar teoretis untuk memperkirakan bahwa pengangguran yang tinggi dan persisten menurunkan pertumbuhan tampaknya terkait erat dengan ketimpangan. Lebih jauh, mereka berpandangan bahwa pengangguran akan menyebabkan ketimpangan. Mereka menemukan bahwa dampak negatif dari angka pengangguran yang tinggi terhadap pertumbuhan jangka panjang akan lebih relevan jika dihubungkan dengan meningkatnya ketimpangan.

#### **14. Infrastruktur**

Sistem Infrastruktur seperti transportasi, listrik, telekomunikasi, air, dan lainnya mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur saling berhubungan satu sama lain, sistem transportasi merupakan suatu alat untuk memastikan pengiriman barang dan jasa sebagai salah satu indikator untuk suatu kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi terhadap kualitas hidup. Permintaan untuk infrastruktur akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade ke depan, didorong oleh

faktor-faktor utama perubahan seperti pertumbuhan ekonomi global, kemajuan teknologi, perubahan iklim, urbanisasi dan tingginya tingkat kemacetan.

Namun, tantangan akan semakin meningkat ketika beberapa bagian dari sistem infrastruktur di negara-negara OECD semakin tua dan rusak dengan cepat, keuangan publik menjadi semakin ketat, dan pembiayaan infrastruktur menjadi jauh lebih kompleks. Akibatnya, kesenjangan akan terjadi antara investasi infrastruktur yang diperlukan untuk masa depan, dan kapasitas sektor publik untuk memenuhi persyaratan dari sumber-sumber tradisional. Solusi kesenjangan infrastruktur yang semakin tinggi akan menuntut pendekatan inovatif, baik untuk mencari pembiayaan tambahan dan untuk menggunakan infrastruktur yang lebih efisien dan lebih cerdas melalui teknologi baru, strategi manajemen permintaan, perubahan regulasi dan perencanaan harus ditingkatkan.

#### **a. Hubungan antara Infrastruktur terhadap Ketimpangan Wilayah**

Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pemerataan ekonomi Indonesia adalah positif. ketika pembangunan infrastruktur dengan indikator jalan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan indikator pendapatan per kapita, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerataan ekonomi.

Berdasarkan teori Stone maupun Grigg menyebutkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh pada aspek sosial, antara lain mampu meningkatkan pemerataan, sedangkan hasil pada penelitian ini menunjukkan pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi dan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Lopez dalam Sari (2011) juga menyatakan bahwa perbaikan di sektor infrastruktur dapat mendorong pemerataan yang

progresif, artinya pembangunan infrastruktur seharusnya dapat mempengaruhi pemerataan ekonomi negara. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryaningsih, et al (2014) yang menyatakan bahwa walaupun pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan per kapita, namun pemerata.

## **B. Penelitian Terdahulu**

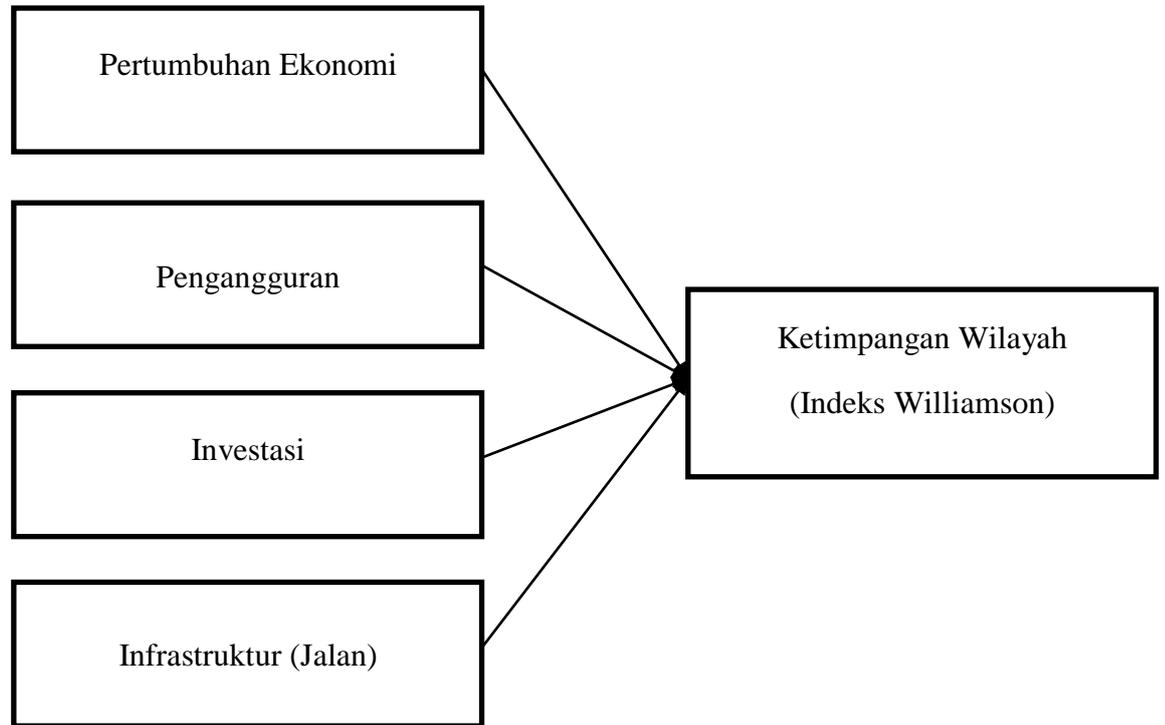
1. **Narina Krinantiya (2014)** penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di provinsi Jawa timur dan d.i.yogyakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, dan aglomerasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, Analisis deskriptif dan Korelasi Pearson yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta diukur dengan indeks Williamson. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta, serta menganalisis pengaruh variabel investasi, aglomerasi, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan antar wilayah di kedua provinsi tersebut.
2. **Doni Mahardika, Rokhedi Priyo Santoso (2013)** penelitian ini mengenai Analisis Perubahan Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia 2006-2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Indonesia dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita per provinsi. Metode perhitungan untuk analisis ketimpangan adalah Indeks ketimpangan Williamson dan Indeks ketimpangan Entropi Theil,

sedangkan perkembangan distribusi pendapatan dengan Paired Sample T-Test. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia 2006-2011 dan melihat apakah selama periode tersebut terjadi peningkatan ketimpangan yang signifikan. Berdasarkan uji paired t-Test ditemukan hasil bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan pada 2011 dibandingkan dengan 2006. Sedangkan hasil dari Indeks Theil didapatkan tingkat ketimpangan di Indonesia selama periode penelitian cenderung menurun dengan nilai sebesar 0,34 pada tahun 2011 meskipun meningkat pada akhir periode. Hasil dari tipologi Klassen menunjukkan bahwa kecenderungan provinsi berada pada kategori daerah maju tapi tertekan.

3. **Tatan Sukwika (2018)** penelitian ini mengenai Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ketimpangan infrastruktur dan ekonomi antarwilayah (provinsi) di Indonesia serta mengkaji keterkaitan di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu Indeks Williamson, tipologi Klassen, analisis korelasi dan regresi. Metode ini diharapkan dapat memberikan lingkup analisis yang memadai untuk menginvestigasi tren dan keterkaitan pembangunan infrastruktur dan ketimpangan ekonomi antara wilayah di Indonesia. Hasil penelitian menemukan adanya kesenjangan ekonomi (PDRB per kapita) yang cukup tinggi antarprovinsi di Indonesia selama periode 2011-2015. Hal ini diperlihatkan oleh nilai Indeks Williamson PDRB per kapita yang berkisar pada angka 0.7. Tingginya kesenjangan tersebut seringkali diasosiasikan dengan kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antara provinsi. Hasil ini

terlihat dari cukup kuatnya korelasi positif antara kesenjangan PDRB per kapita dan kesenjangan infrastruktur antarprovinsi.

### C. Kerangka Pemikiran



### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konseptual, diperoleh hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.
2. Diduga pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.
3. Diduga investasi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.
4. Diduga infrastruktur berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan fakta-fakta dengan interpretasi yang menggunakan metode statistik deskriptif dan metode ekonometrika. Metode yang tepat untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-proses yang sedang berlangsung. Metode ekonometrika digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kemudian diuji apakah variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, baik secara individu ataupun bersama-sama.

#### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil provinsi-provinsi di pulau Sumatera. Dipilihnya Sumatera sebab ketimpangan yang terjadi untuk wilayah Sumatera cukup terlihat, dimana untuk beberapa daerah di wilayah Sumatera seperti provinsi Bengkulu dan Jambi cukup tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang telah diterbitkan oleh berbagai instansi. Penelitian ini menggunakan metode panel data, data cross section dari 10 provinsi di Sumatera, data time series periode 2009-2019, dan menggunakan

lima variabel, yaitu ketimpangan menggunakan Indeks Williamson, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Investasi, dan Infrastruktur. Penggunaan data panel memberikan banyak keunggulan secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain (Gujarati, 2003) :

- a) Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu sehingga membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- b) Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya maka pengguna data panel akan mengurangi masalah *omitted variable* secara substansial.
- c) Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang sehingga metode data panel cocok digunakan untuk *study of dynamic adjustment*.
- d) Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang dan peningkatan derajat kebebasan sehingga diperoleh estimasi yang lebih efisien.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak diperlukannya pengujian asumsi klasik.

## 2. Sumber Data

Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Indeks Williamson	Y	Indeks	Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persentase	Badan Pusat Statistik
Pengangguran	PGR	Persentase	Badan Pusat Statistik
Investasi	I	Persentase	Badan Penanaman Modal
Infrastruktur	INR	KM	Badan Pusat Statistik

### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengatur konstruk atau variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) macam variabel, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Investasi, dan Infrastruktur.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah1:

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi. Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi merupakan ukuran dari disparitas (ketimpangan) pembangunan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan wilayah diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson (Sjafrizal, 2012) :

$$Iw = \frac{\sqrt{\sum(Yi - \bar{Y})^2 fi/n}}{\bar{Y}}, 0 < Iw < 1$$

Dimana :

$Y_i$  = PDRB per kapita daerah i

$\bar{Y}$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah i

$N$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks ketimpangan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < IW < 1$ . Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan wilayah (Safrizal, 2012).

## 2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat (Sugiono, 2009). Variable independen dalam penelitian ini adalah:

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam satuan persen di provinsi wilayah Sumatera. Dengan rumus:

$$PE = \frac{\%DRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

#### b. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan. Pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran yang diukur dalam indeks provinsi-provinsi di pulau sumatera.

$$PGR = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

#### c. Investasi

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Investasi dalam penelitian ini menggunakan data investasi PMDN dan PMA yang diukur dalam persentase di Provinsi wilayah Sumatera.

$$Inv = \frac{\text{Jumlah Investasi}}{PDB} \times 100\%$$

#### d. Infrastruktur

Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur dalam penelitian ini menggunakan data infrastruktur yang diukur dalam satuan panjang jalan (KM) di Provinsi Sumatera. Jalan adalah infrastruktur yang paling penting di suatu daerah karena selain menjadi fasilitas yang digunakan warga daerah juga menjadi penghubung antar daerah.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari lembaga – lembaga terkait. Pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal – jurnal yang berhubungan dengan masalah ketimpangan antar wilayah.

## **E. Metode Analisis dan Pengolahan Data**

### **1. Analisis Deskriptif**

Menurut jurnal Mudrajad Kuncoro (2003), penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu keadaan dan mencoba untuk mencari suatu uraian yang menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Dalam analisis deskriptif dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut. Disamping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode Data Panel sebagai alat ekonometrika perhitungannya serta di gunakan juga metode analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel ataupun populasi yang diamati dan dapat digambarkan lewat tabel dan gambar sehingga dapat memberikan informasi yang baik yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dan analisis deskriptif digunakan uji asumsi klasik yang meliputi :

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable independen dan variable dependen, keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, Ghozali (2006). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (*scatterplot*) yaitu dengan melihat normal *probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk memperkuat pengujian, uji normalitas yang dapat digunakan adalah uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

#### **b. Uji Multikoleniaritas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada nya korelasi antar variable bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variable independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variable independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable independen manakah yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variable independen menjadi variable dependen (terikat) dan diregresi terhadap variable independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya.

Pengambilan keputusan:

*Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.

*Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas

### c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat *korelasi* antara *residual* pada periode  $t$  dengan *residual* periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bias menggunakan Uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Kriteria pengujian Durbin Watson sebagai berikut:

- (1) Jika angka statistic D-W dibawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
- (2) Jika angka statistik D-W diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.
- (3) Jika angka statistik D-W di atas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *varians* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji *glejser*. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika nilai Sig variable independen  $< 0,05$  terjadi Heterokedastitas.

Jika nilai Sig variable independen  $> 0,05$  tidak terjadi Heterokedastitas.

## 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variable independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variable dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variable dependen apakah masing-masing variable independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variable dependen apabila nilai variable independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PGR_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 INR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  : Indeks Williamson (indeks)

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Regresi

PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)

PGR : Pengangguran (%)

INV : Investasi (%)

INR : Infrastruktur (KM)

$\varepsilon$  : error

## 2. Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari *Goodness of Fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistic uji F dan nilai statistic uji t. Perhitungan statistic disebut signifikan secara statistic apabila nilai uji statistic nya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima

(Ghozali,2006).

**a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau koefisien penentu  $R^2$  merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persen, yang menunjukkan besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengukur kebenaran hubungan dari model yang dipakai yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians/penyebaran dari variable independen yang menerangkan variable dependen. Besarnya nilai  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antar variable independen dengan variable dependen, demikian sebaliknya (Ghozali, 2006).

**b. Uji F**

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variable – variable bebas secara bersama – sama terhadap variable terikat (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05.

**c. Uji T**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable bebas secara individual mempengaruhi variable terikat dengan asumsi variable independen lainnya konstan. Uji signifikan t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variable independen terhadap variable dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variable independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing- masing variable independen terhadap variable dependen. Uji t

dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung terhadap  $t$  table. Dalam penelitian ini, uji- $t$  adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

$H_0 : \beta_1 = 0$  tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah.

$H_a : \beta_1 < 0$  terdapat pengaruh negatif signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah.

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Wilayah

$H_0 : \beta_1 = 0$  tidak signifikan antara pengangguran terhadap ketimpangan wilayah.

$H_a : \beta_1 > 0$  terdapat pengaruh positif signifikan antara pengangguran terhadap ketimpangan wilayah.

3. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Wilayah

$H_0 : \beta_1 = 0$  tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antara investasi terhadap ketimpangan wilayah.

$H_a : \beta_1 > 0$  terdapat pengaruh positif signifikan antara investasi terhadap ketimpangan wilayah.

4. Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Wilayah

$H_0 : \beta_1 = 0$  tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antara infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah.

$H_a : \beta_1 > 0$  terdapat pengaruh positif signifikan antara infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah.

Untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t table. Nilai t-hitung dapat diperoleh dari nilai t-statistik pada output eviews, sedangkan nilai t-tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menggunakan degree of freedom (df) sebesar  $n-k-1$ . Kriteria pengujian uji T yaitu :

- 1) Jika  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
- 2) Jika  $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Sumatera.
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Sumatera.
3. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi-provinsi di Sumatera.
4. Infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap wilayah perkapita provinsi-provinsi di Sumatera.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi harus lebih ditingkatkan untuk wilayah yang berada di wilayah ujung Sumatera seperti Aceh, agar kegiatan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan ketimpangan provinsi-provinsi semakin menurun.
2. Investasi yang ada dialokasikan untuk kegiatan industri ekonomi yang berbasis pembangunan, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya ke wilayah di Indonesia.

3. Campur tangan pemerintah untuk memacu perluasan lapangan kerja yang akan menyerap pengangguran sehingga ketimpangan dapat menurun.
4. Perlu adanya peran pemerintah seperti peningkatan investasi di bidang infrastruktur dalam membantu menyebarkan efek pembangunan yang bisa memperkecil ketimpangan wilayah provinsi-provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Al Faizah, S.A. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi (Tahun 2011-2015)*.
- Antonescu, Daniela. (2010). *The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration*. *Scientific Researcher*, 2(40). Halaman:161-183.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta. . 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke lima, Penerbit UPP.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi. Pertama, Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik, Sumbar *Dalam Angka*.
- Arsyad, Lincolyn. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Doni Mahardiki, Rokhedi Priyo Santoso. 2013. *Analisis Prubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia 2006-2011*. Universitas Islam Indonesia Journal Of Economics And Policy.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M. (2014). *Ketimpangan Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik 2014*. Info Singkat : Ekonomi Dan Kebijakan Publik, VI(2), 13–16.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.Jakarta
- Hartono, Jogiyanto. 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kelima*. BPFE.
- Hyman, David N. 1992. *Public Finance*, Dryden Press, London.
- Istiqomah, Rustianik. 2018. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Investasi (PMA) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

- Istiqomah, R. 2018. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Investasi (PMA) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.
- Jhingan, ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, Rajawali Press.
- Krinantiya, Narina. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta*. Jurnal FE UNDIP.
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld, 2005, *Ekonomi Internasional Teori. Dan Kebijakan*, edisi 5 jilid 2, Jakarta, PT.Indeks kelompok Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Maryaningsih, N., Oki, H., dan Myrnawati, S. 2014. *The Role of Infrastructure on Economic Growth In Indonesia. Economic Researcher in BRE DKM Indonesian Bank, 17(1), 56-88*.
- Mauliddiyah, Alfiana. 2014. *Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012)*. Jurnal JESP, 6(2).
- Meier, M.G. 1995. *Leading Issues in Economics. Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mikesell, Raymond. 1995. *Economic Development. The Sociology of International Relations*. Berg Pub. Ltd.
- Putri, Rizka Mardelia Okta. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi lampung. Skripsi Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung: Tidak Diterbitkan*
- Sari, P. 2011. *Analisis Pengaruh Program Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Tertinggal. Tesis Institut Pertanian Bogor*
- Sholihah, Ni'matush. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

- Sjafrizal. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stone, M. 1974. Cross Validatory Choise and Assesment of Statistical. Predictions. *Journal of The Royal Statistical Society, Series B*, 36(2).
- Sударlan.(2015). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal EKSIS vol. 11 No. 1, April 2015: 3036-3213*
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. Arikunto, S. 2010.
- Sukirno, Sadono. 1996 *Teori Pembangunan Ekonomi*.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004.“*Makroekonomi, Teori Pengantar. Edisi Ketiga, Cet. 15*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia.
- Suhartono. 2015. *Ketimpangan dan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di daerah hasil pemekaran: studi kasus di provinsi banten dan gorontalo*.
- Supranto J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi. Edisis Tujuh. Bandung: Erlangga*
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta Erlangga.
- Yeniwati. (2013). *Ketimpangan ekonomi antar provinsi di Sumatera*. *Jurnal Kajian Ekonomi* 2 (3), 1-13